

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Menurut temuan penelitian yang dilakukan dalam menganalisis pengaruh pajak daerah, belanja modal, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya semakin besar pajak daerah maka semakin baik kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah dengan penerimaan pajak yang tinggi memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai program dan proyek pembangunan, yang menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.
2. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi belanja modal belum tentu secara langsung dan cepat tercermin dalam peningkatan kinerja keuangan, kemungkinan karena masalah efisiensi, perencanaan, atau sifat dampaknya yang jangka panjang.
3. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya semakin besar *intergovernmental revenue* maka semakin menurun kinerja keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi ketergantungan fiskal di mana dana transfer yang besar dapat mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau mengelola keuangan secara efisien.
4. Simultan pajak daerah, belanja modal, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada variabel yang tidak signifikan secara parsial atau bahkan berpengaruh negatif, kombinasi ketiganya membentuk model yang kuat dalam menjelaskan kinerja keuangan daerah.

5. Sistem pengendalian internal dapat menguatkan pengaruh positif pajak daerah terhadap kinerja keuangan daerah. SPI yang efektif meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pajak, sehingga memaksimalkan dampaknya terhadap kinerja keuangan.
6. Sistem pengendalian internal tidak dapat menguatkan pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa SPI memiliki keterbatasan dalam memastikan efektivitas investasi belanja modal, yang lebih dipengaruhi oleh faktor strategis dan teknis.
7. Sistem pengendalian internal dapat menguatkan pengaruh positif *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan daerah. Ini merupakan temuan paradoks, di mana SPI yang kuat justru menyoroti atau memperparah dampak negatif ketergantungan pada dana transfer, kemungkinan dengan mengungkapkan inefisiensi atau alokasi yang kurang optimal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Objek penelitian hanya terbatas pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada pemerintah daerah lainnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data dalam satu tahun pengamatan yaitu tahun 2023, sehingga hasil penelitian belum mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh dari waktu ke waktu.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu pajak daerah, belanja modal, dan *intergovernmental revenue* padahal ada variabel lain yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti pendapatan asli daerah, *leverage*, dan ukuran pemerintah daerah.

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan belanja

modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Namun pajak daerah, belanja modal, dan *intergovernmental revenue* secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Studi juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal mampu menguatkan pengaruh pajak daerah dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan. Namun, sistem pengendalian internal tidak dapat menguatkan pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah., maka implikasi penelitian yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian dan kinerja keuangan.
2. Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi belanja modal, bukan hanya pada kuantitasnya. Perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan evaluasi pasca-proyek menjadi krusial untuk memastikan belanja modal memberikan nilai tambah bagi kinerja keuangan daerah.
3. Pemerintah daerah yang sangat bergantung pada *intergovernmental revenue* perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi fiskal mereka. Penting untuk mengembangkan kemandirian fiskal dengan meningkatkan PAD dan memastikan bahwa dana transfer digunakan secara produktif dan efisien untuk menghindari dampak negatif terhadap kinerja keuangan.
4. Pemerintah daerah harus terus memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah seperti pajak. Investasi dalam sistem dan sumber daya manusia untuk SPI akan memberikan pengembalian yang signifikan dalam bentuk peningkatan kinerja keuangan.
5. Selain memperkuat SPI, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kapasitas perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek belanja modal. Pengawasan yang lebih komprehensif yang mencakup aspek strategis dan teknis diperlukan untuk memastikan belanja modal memberikan dampak positif yang signifikan.

6. Pemerintah daerah perlu memiliki SPI yang kuat, juga strategi yang jelas untuk mengelola dana transfer. SPI harus dilengkapi dengan mekanisme evaluasi efektivitas program dan proyek yang didanai dari transfer, serta insentif untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan desain kebijakan transfer yang mendorong akuntabilitas dan efisiensi, bukan hanya kepatuhan.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian dengan memperluas cakupan penelitian pada pemerintah daerah lain, menggunakan jangka waktu penelitian yang lebih panjang, serta menambahkan variabel yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti pendapatan asli daerah, *leverage*, dan ukuran pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan sumber-sumber lain. Fokus harus dialihkan dari sekadar kuantitas belanja modal ke kualitas dan efisiensinya. Perencanaan proyek yang matang, pengawasan yang ketat, dan evaluasi pasca-proyek sangat diperlukan untuk memastikan belanja modal benar-benar memberikan nilai tambah dan dampak positif jangka panjang. Pemerintah daerah juga harus mengelola dana transfer ini secara lebih strategis. Dana tersebut harus digunakan untuk investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.